

# **Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Puji Lestari/Machya Astuti Dewi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’  
Yogyakarta, Jl. Babarsari no 2 Yogyakarta  
Hp. 08156874669 / e-mail : [pujilestariginting@yahoo.co.id](mailto:pujilestariginting@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*Public communication phenomenon shows that there is gap between women and men. It caused by cross culture position which there is perspective differences tend to gender discriminative and linguistics culture differences. It is interested to study in order to anticipate that gap. Communication theory that discuss gender and communication issues that is: Genderlect Styles (Deborah Tannen); Standpoint Theory (Sandra Harding and Julia Wood); and Muted Group Theory (Cheris Kramarae). The research is aim to find PUG communication model which appropriate to staff and official condition of Provincial Department of DIY. Used research method is qualitative method with data collecting technique use Focus Group Discussion (FGD) and communication model trial. Pengarusutamaan Gender (PUG) and Anggaran Responsive Gender (ARG). The result obtained communication model of PUG-ARG is tested for two days. Source is from competent LSM, and interesting training model. The result of pre test showed that research subject was already understand about gender and gender responsive, but they were not implement it yet in work program, and the result of post test showed that the training participant from representation of Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo and Sleman regency department felt satisfy to material, method, and resource person. The result of PUG-ARG training could be implemented in each department. This model could smooth communication process making work process which responsive gender and implemented to program planning, implementation, and evaluation, and supported by all department personnel which have sufficient knowledge concerning PUG, for public harmonization and welfare, especially in DIY Province administration.*

## **Abstrak**

Fenomena komunikasi di masyarakat menunjukkan adanya gap antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh posisi lintas budaya (*cross culture*), ada perbedaan perspektif diskriminatif gender dan perbedaan budaya linguistik. Penelitian ini bertujuan menemukan model komunikasi PUG yang sesuai dengan kondisi di Dinas Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan teori : *Genderlect Styles*,; *Standpoint Theory*, dan *Muted Group Theory* . Metode penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data *Focus Group Discussion* (FGD) dan ujicoba model komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model komunikasi PUG-ARG yang diujicobakan, mengerti tentang gender dan responsive gender, namun belum mengimplementasikan dalam program kerja, dan hasil post test ternyata para peserta pelatihan dari perwakilan dinas Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman merasa puas dengan materi, metode, narasumber. Hasil pelatihan PUG-ARG dapat diimplementasikan di dinas masing-masing. Model ini dapat memperlancar dalam proses komunikasi pembuatan program kerja yang responsive gender dan diimplementasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta didukung oleh personil di semua dinas yang memiliki pengetahuan memadai tentang PUG, demi keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pemerintahan Provinsi DIY.

**Kata kunci** : komunikasi gender, Pengarusutamaan gender (PUG), Anggaran responsive gender (ARG)

## Pendahuluan

Posisi perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses perencanaan pembangunan masih lemah. Data yang ditemukan oleh *Indonesia Rapid Decentralization Appraisal* (IRDA) menunjukkan bahwa akses masyarakat DIY dalam menentukan prioritas program pembangunan masih sangat rendah (Aksara, 2010). Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar usulan warga masyarakat termasuk perempuan lebih merupakan masukan yang ditampung saja, baik di tingkat desa atau kelurahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kecamatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), maupun tingkat kabupaten dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang). Formulasi kebijakan sangat diwarnai oleh pola komunikasi *top down*, bukan *bottom up*. Pada saat Rakorbang di kabupaten, keputusan birokrat terlihat dominan, karena pejabat tersebut yang lebih berkuasa atas dana pembangunan. Model komunikasi *top down* dipilih pemerintah daerah dengan alasan efisiensi waktu dalam proses perumusan kebijakan (Idea, 2007). Fenomena yang patut menjadi keprihatinan adalah mulai dari desa atau kelurahan dan kecamatan yang lebih banyak diundang untuk hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah laki-laki, sehingga akses perempuan sangat kecil. Di tingkat kabupaten jumlah perempuan yang ikut menentukan program prioritas pembangunan amatlah kecil (Partini, 2004: 321).

Peneliti menemukan kendala implementasi PUG di Provinsi DIY lebih disebabkan oleh model komunikasi dalam sosialisasi yang kurang mengenai sasaran yaitu masih banyak ketimpangan antara kaum laki-laki dan perempuan di dinas-dinas Provinsi DIY. Dengan kata lain model komunikasi yang searah yang bersifat *top down* tersebut menyebabkan sosialisasi PUG-ARG menjadi kurang seimbang. Para pejabat lebih banyak dipegang kaum laki-laki, sementara program kerja dan anggaran juga disusun oleh kaum laki-laki yang kurang responsive gender. Hal ini disebabkan oleh kekurangpahaman dinas-dinas pemerintah dalam memaknai apa sesungguhnya

PUG itu. Sebagian besar dinas masih keliru dalam menafsirkan program PUG sebagai program untuk kaum perempuan (Aksara, 2010). Hal itu nampak dalam jawaban sewaktu dilakukan FGD dengan dinas-dinas di provinsi DIY. Ketika fasilitator meminta kepada seluruh wakil dari dinas di provinsi DIY untuk menceritakan pelaksanaan program PUG di dinas masing-masing hampir seluruh peserta mengemukakan program-program untuk kaum perempuan yang dirancang oleh masing-masing dinas. Wakil dari Dinas Pariwisata misalnya, mengungkapkan beberapa program kegiatan tahun 2009 untuk perempuan, yaitu pelatihan kuliner masyarakat di kawasan Goa Mulo Gunung Kidul, Pantai Depok Bantul dan Trimulyo Bantul, pemilihan Dinas Diajeng DIY, Jogja *Fashion Week*, peringatan hari pangan sedunia, gelar batik "*Confidence with Beautiful Batik*", dan gelar makanan tradisional. Wakil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemukakan program pembinaan perempuan korban PHK yang dilatih membuat dan ketrampilan di bidang boga agar memiliki kemandirian ekonomi. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi DIY menuturkan mengenai program pemberdayaan untuk kelompok wanita nelayan di tiga kabupaten agar bisa membantu suami, yaitu budidaya rumput laut dan budidaya ikan di lahan pasir oleh perempuan (FGD, 19 Agustus 2009). Pemaknaan bahwa PUG adalah identik dengan program untuk kaum perempuan tentu saja keliru karena program untuk perempuan belum tentu berperspektif gender. Alokasi anggaran untuk PUG sebagian dialokasikan untuk memajukan kaum perempuan. Menurut konsep ARG harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan perempuan saja. Pegawai laki-laki yang belum setara dengan perempuan, maka ARG juga ditujukan untuk program-program peningkatan PUG untuk pegawai laki-laki.

Kendala yang ditemukan pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG oleh dinas-dinas di provinsi DIY belum berjalan baik karena komunikasi gender yang kurang efektif. Berbagai program telah dirancang dan dilakukan sebagai bentuk sosialisasi mengenai arti penting PUG termasuk melalui media massa (Dewi, 2009). Berkaitan dengan hal itu perlu

dilakukan penelitian mengenai model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG yang merumuskan model alternatif untuk sosialisasi PUG-ARG agar program PUG di provinsi DIY dapat berjalan lebih baik. Berdasarkan paparan tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana model komunikasi yang tepat untuk melakukan sosialisasi PUG dalam mengatasi kendala-kendala PUG di Provinsi DIY ?

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Instruksi Presiden atau Inpres No. 9 Tahun 2000). Dalam Inpres tersebut seluruh jajaran eksekutif yaitu, Gubernur, Bupati, Walikota harus melaksanakan PUG dalam semua tahapan pembangunan (Soeparman, 2006:35).

PUG merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi atau aspek gender yaitu melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subjek dan objek) yang setara dalam akses, partisipasi, kontrol atas pembangunan, dan memanfaatkan hasil pembangunan. Pada prinsipnya PUG menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya, demokrasi, pemerataan, keadilan dan kesetaraan (Silawati, 2006).

Otonomi Daerah diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang adil bagi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, karena hal tersebut merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan. Strategi yang selama ini dilakukan adalah melalui pengarusutamaan gender dan penyusunan anggaran yang responsif gender. Dengan demikian keinginan, permasalahan, dan aspirasi laki-laki dan perempuan dapat diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hasil yang dicapai dapat

memberikan dampak yang sama bagi laki-laki dan perempuan (Sulistyo dan Dhatik Fatimah, 2010).

Manfaat dari model komunikasi PUG-ARG ini adalah: (1) Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya baik perempuan dan laki-laki. (2) Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender dapat membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. (3) PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. (4) PUG mengantar kepada pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. (5) Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik, Ekonomi suatu bangsa. (6) Dapat diidentifikasi apakah laki-laki & Perempuan memperoleh akses yang sama kepada Sumber Daya Pembangunan. (7) Laki-laki dan perempuan berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan. (8) Laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. (9) Laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Dalam rangka menyatukan gagasan dari berbagai pihak tentang PUG-ARG, perlu disusun rencana tindak yang terkoordinasi. Berbagai upaya yang dilakukan dapat terlaksana secara optimal, asal ada proses komunikasi yang lancar antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (khususnya Pusat Studi Wanita) dan segenap masyarakat untuk melaksanakan PUG dan ARG.

Pembahasan mengenai gender dan komunikasi, dapat digunakan kerangka teori sebagai acuan, yaitu : *Genderlect Styles* (dari Deborah Tannen); *Standpoint Theory* (dari Sandra Harding dan Julia Wood); dan *Muted Group Theory* (dari Cheri Kramarae).

Menurut *Genderlect Styles* (Griffin, 2006:470), Deborah Tannen mendeskripsikan

ketidaktahuan (*misunderstanding*) antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan fakta bahwa fokus pembicaraan perempuan adalah koneksi, sementara laki-laki pada pelayanan status dan kemandiriannya. *Genderlect Styles* membicarakan gaya bercakap-cakap -bukan apa yang dikatakan tetapi bagaimana mengatakannya. Tannen meyakini bahwa terdapat *gap* antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan masing-masing berada pada posisi lintas budaya (*cross culture*), untuk itu perlu mengantisipasi berkenaan dengan *gap* itu. Kegagalan mengamati perbedaan gaya berbicara dapat membawa masalah yang besar. Perbedaan-perbedaan itu terletak pada: (1) Kecenderungan feminis versus maskulin, hal ini harus dipandang sebagai dua dialek yang berbeda: antara superior dan inferior dalam pembicaraan. Komunitas feminis – untuk membangun *relationship* dan menunjukkan responsif. Komunitas maskulin – menyelesaikan tugas; menyatakan diri; dan mendapatkan kekuasaan. (2) Perempuan berhasrat pada koneksi versus laki-laki berhasrat untuk status. Koneksi berhubungan erat dengan kedekatan, status berhubungan erat dengan kekuasaan (*power*). (3) *Rapport talk versus report talk*. Perbedaan budaya linguistik berperan dalam menyusun kontak verbal antara laki-laki dan perempuan. *Rapport talk* adalah istilah yang digunakan untuk menilai obrolan perempuan yang cenderung terkesan simpatik. *Report talk* adalah istilah yang digunakan untuk menilai obrolan laki-laki yang cenderung apa adanya, pokoknya sampai. Berkenaan dengan kedua nilai ini, Tannen mendeskripsikan temuan-temuan yang dikategorikan sebagai berikut, (Griffin, 2006:474): (a). *Public speaking versus private speaking*, dalam kategori ini ditemukan bahwa perempuan lebih banyak bicara pada pembicaraan pribadi. Sedangkan laki-laki lebih banyak terlibat pembicaraan publik, laki-laki menggunakan pembicaraan sebagai pernyataan fungsi perintah; menyampaikan informasi; meminta persetujuan. (b). *Telling a story*, cerita-cerita menggambarkan harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, dan nilai-nilai si pencerita. Pada kategori ini laki-laki lebih banyak bercerita dibanding perempuan-khususnya tentang *guyonan*. Cerita *guyonan* merupakan suatu cara maskulin

menegosiasikan status. (c). *Listening*, perempuan cenderung menjaga pandangan, sering *manggut-manggut*, bergumam sebagai tanda telah mendengarkan dan menyatakan kebersamaannya. Laki-laki dalam hal mendengarkan berusaha mengaburkan kesan itu- sebagai upaya menjaga statusnya. (d). *Asking questions*, ketika ingin bicara untuk menyela pembicara, perempuan terlebih dahulu mengungkapkan persetujuan. Tannen menyebutnya sebagai kooperatif-sebuah tanda *rapport* simpatik daripada kompetitif. Pada laki-laki, interupsi dipandang oleh Tannen sebagai *power* atau kekuasaan untuk mengendalikan pembicaraan. Dengan kata lain, pertanyaan dipakai oleh perempuan untuk memantapkan hubungan, dan untuk memperhalus ketidaksetujuan dengan pembicara, sedangkan laki-laki memakai kesempatan bertanya sebagai upaya untuk menjadikan pembicara menjadi lemah. (e). *Conflict*, perempuan memandang konflik sebagai ancaman dan perlu dihindari. Laki-laki biasanya memulai konflik namun kurang senang memeliharanya.

Tannen berpendapat bahwa kesulitan kesulitan berkomunikasi yang dihadapi oleh pria dan wanita sama halnya dengan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang dengan latarbelakang kebudayaan yang berbeda. Ini menjelaskan mengapa perbedaan kelamin tetap masih menimbulkan masalah dalam komunikasi. Teori Tannen memperlihatkan keterkaitan antara komunikasi antargender di Indonesia. Teori-teori ini dapat dipakai untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam komunikasi antargender yang banyak diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan agama (Basalama, 2010:836).

Menurut *Standpoint Theory* (Griffin, 2006:482), Sandra Harding dan Julia T. Wood sepakat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perspektif terpisah, dan tidak memandang sebagai sesuatu yang setara. Lokasi-lokasi yang berbeda dalam hirarki sosial mempengaruhi apa yang dilihat. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan sebagai minoritas mempersepsi dunia secara berbeda daripada kelompok yang berkuasa atau mayoritas laki-laki. *Standpoint* merupakan tempat dari mana melihat pemandangan dunia dan apapun sudut

pandangannya. Sinonim dari istilah ini adalah *view-point, perspective, outlook and position*.

Dasar filosofi teori ini adalah perjuangan kelas seperti filsafat kaum proletar karya Karl Marx dan Friederich Engels (Griffin, 2006, 482). Sandra Harding dan Julia T. Wood menganjurkan adanya perjuangan terhadap diskriminasi gender. Tokoh tersebut tidak mencirikan perbedaan *gender* pada insting atau biologis atau intuisi, tetapi perbedaan itu sebagai hasil harapan-harapan budaya dan perlakuan kelompok dalam hal menerima kelompok yang lain. Budaya tidak dialami secara identik, budaya adalah aturan hirarkhi sehingga kelompok yang mempunyai posisi cenderung menawarkan kekuasaan, kesempatan pada anggota-anggotanya. Dalam hal ini teori ini menyatakan bahwa perempuan terposisikan pada hirarkhi yang rendah dibanding posisi laki-laki. Gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi di mana kebanyakan laki-laki dan perempuan dipisahkan secara lingkungan, material, dan simbolis.

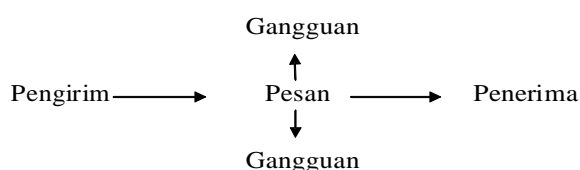
Menurut *Muted Group Theory* atau Teori Kelompok Bungkam (West and Turner, 2008: 200), Griffin, 2006: 494), Cheris Kramarae memandang pembicaraan laki-laki dan perempuan sebagai pertukaran yang tidak setara antara pihak yang mempunyai kekuasaan di masyarakat dan yang tidak. Berdasarkan analisisnya bahwa perempuan kurang bisa mengartikulasikan diri atau memperjuangkan diri dibanding laki-laki di sektor publik. Hal ini disebabkan kata dalam bahasa dan norma-norma yang digunakan itu telah dikendalikan oleh laki-laki. Sepanjang pembicaraan perempuan sebagai tentatif dan *sepele*, posisi dominan laki-laki aman. Kramarae yakin bahwa kebisuhan perempuan itu cenderung menipis, kontrol dalam kehidupan akan meningkat. Cheris Kramarae mengemukakan asumsi-asumsi dasar dari teori ini sebagai berikut: (1) Perempuan menanggapi dunia secara berbeda dari laki-laki karena pengalaman dan aktivitasnya berbeda yang berakar pada pembagian pekerjaan. (2) Berdasarkan dominasi politiknya, sistem persepsi laki-laki menjadi lebih dominan, menghambat ekspresi bebas bagi pemikiran alternatif perempuan. (3) Agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah

perspektif ke dalam sistem ekspresi yang dapat diterima laki-laki.

Kramarae (dalam West and Turner, 2008: 200) mengemukakan sejumlah hipotesis mengenai komunikasi perempuan berdasarkan beberapa temuan penelitian. (1) Perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dibanding laki-laki. (2) Perempuan lebih mudah memahami makna laki-laki daripada laki-laki memahami makna perempuan. (3) Perempuan telah menciptakan cara-cara ekspresinya sendiri di luar sistem laki-laki yang dominan. (4) Perempuan cenderung untuk mengekspresikan lebih banyak ketidakpuasan tentang komunikasi dibanding laki-laki. (5) Perempuan seringkali berusaha untuk mengubah aturan-aturan komunikasi yang dominan dalam rangka menghindari atau menentang aturan-aturan konvensional. (6) Secara tradisional perempuan kurang menghasilkan kata-kata baru yang populer dalam masyarakat luas; konsekuensinya, mereka merasa tidak dianggap memiliki kontribusi terhadap bahasa. (7) Perempuan memiliki konsepsi humoris yang berbeda dari pada laki-laki.

Teori-teori tersebut ada relevansinya dengan fenomena masyarakat khususnya para pegawai di lingkungan dinas-dinas Provinsi DIY. Budaya masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan masih mewarnai proses komunikasi pada sebagian besar dinas-dinas di Provinsi DIY. Hal tersebut dapat memicu berbagai persoalan komunikasi yang lain, seperti pemilihan pejabat, pembagian tugas, dan lain-lain, maka perlu ditawarkan solusi yang terbaik melalui penelitian ini.

Model komunikasi paling sederhana yang dapat digunakan untuk menganalisis proses sosialisasi PUG-ARG adalah adanya pengirim, pesan, dan penerima seperti gambar berikut ini :



Gambar 1. Model Komunikasi Linear

(Sumber : diadaptasi dari West & Turner, 2007: 11).

Model ini menunjukkan tiga unsur esensi komunikasi yaitu pengirim, pesan, dan penerima, bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Sebagai contoh seorang dapat mengirimkan pesan, tetapi bila tidak ada yang menerima atau yang mendengar, komunikasi tidak akan terjadi. Model komunikasi yang terperinci, dengan unsur-unsur penting dalam suatu proses sosialisasi yaitu: Sumber, pesan, dan penerima.

Sumber (*source*) atau pengirim mengendalikan berbagai pesan yang dikirim, susunan yang digunakan, dan saluran mana yang akan digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Mengubah pesan ke dalam berbagai bentuk simbol-simbol verbal atau nonverbal yang mampu memindahkan pengertian, seperti kata-kata percakapan atau tulisan, angka, gerakan dan sebagainya. Langkah berikutnya sumber mengirimkan pesan melalui berbagai saluran komunikasi lisan. Manfaat komunikasi lisan, antarpribadi adalah kesempatan untuk berinteraksi antara sumber dan penerima, memungkinkan komunikasi nonverbal (gerakan tubuh, intonasi suara, dan lain lain) disampaikannya pesan secara tepat, dan memungkinkan umpan balik diperoleh. Sedangkan komunikasi tertulis dapat disampaikan melalui media seperti: memo, surat, laporan, catatan, buletin, surat kabar, dan sebagainya. Komunikasi tulisan mempunyai kelebihan dalam penyediaan laporan atau dokumen untuk kepentingan masa mendatang.

Proses selanjutnya adalah penerimaan pesan oleh pihak penerima. Pada umumnya penerimaan pesan melalui panca indera. Banyak pesan penting yang tidak diterima oleh seseorang karena orang tersebut tidak menerima pesan karena kesalahan dalam memilih media yang tepat, atau hambatan lainnya, seperti salah persepsi. Pada penyampaian maupun penerimaan pesan sering terdapat hambatan-hambatan komunikasi.

Proses *decoding* menyangkut pemahaman simbol-simbol yang dipergunakan oleh pengirim (sumber). Ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, praduga dan gangguan di sekitarnya. Hambatan dapat terjadi apabila muncul perbe-

daan budaya yang menyebabkan perbedaan persepsi.

Proses terakhir adalah umpan balik. Setelah pesan diterima dan diterjemahkan, penerima memberikan respons, jadi komunikasi adalah proses yang berkesinambungan dan tak pernah berakhir. Inilah yang disebut bahwa komunikasi yang efektif dapat menimbulkan interaksi yang baik dalam melaksanakan tujuan komunikasi.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat sebagai penelitian evaluatif, yaitu akan mengevaluasi pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam era Otonomi Daerah di provinsi DIY untuk dijadikan dasar pemetaan hambatan-hambatan yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan Program PUG di provinsi DIY. Dari hasil evaluasi dirumuskan model komunikasi alternatif untuk sosialisasi PUG di provinsi DIY agar implementasi PUG berjalan lebih baik.

Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) provinsi DIY. Wawancara menggali informasi mengenai program-program pelatihan PUG yang dilakukan oleh BPPM. Dari wawancara ini peneliti mendapatkan data mengenai kegiatan pelatihan PUG yang dirancang untuk diselenggarakan tahun 2010.

Selanjutnya dilangsungkan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang subjek-subjek penelitian sebagai berikut: (1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) provinsi DIY. (2) Kepala Bappeda provinsi DIY. (3) Forum PUG di DIY. (4) Forum agama. (5) Narasumber pelatihan PUG di DIY. (6) Aktivis perempuan dari LSM IDEA & Aksara. (7) Pusat Studi Wanita (PSW) UPN.

Data yang dikumpulkan melalui FGD meliputi masukan dari para peserta mengenai materi dan metode pelatihan PUG yang tepat guna dan tepat sasaran. Sementara itu data sekunder dihimpun dari beberapa sumber tertulis sebagai berikut: (1) Laporan kegiatan sosialisasi PUG

oleh BPPM provinsi DIY. (2) Laporan kegiatan advokasi PUG dari LSM-LSM perempuan. (3) Data internet mengenai program-program pelatihan PUG di berbagai tempat, di dalam negeri Indonesia, maupun di luar negeri.

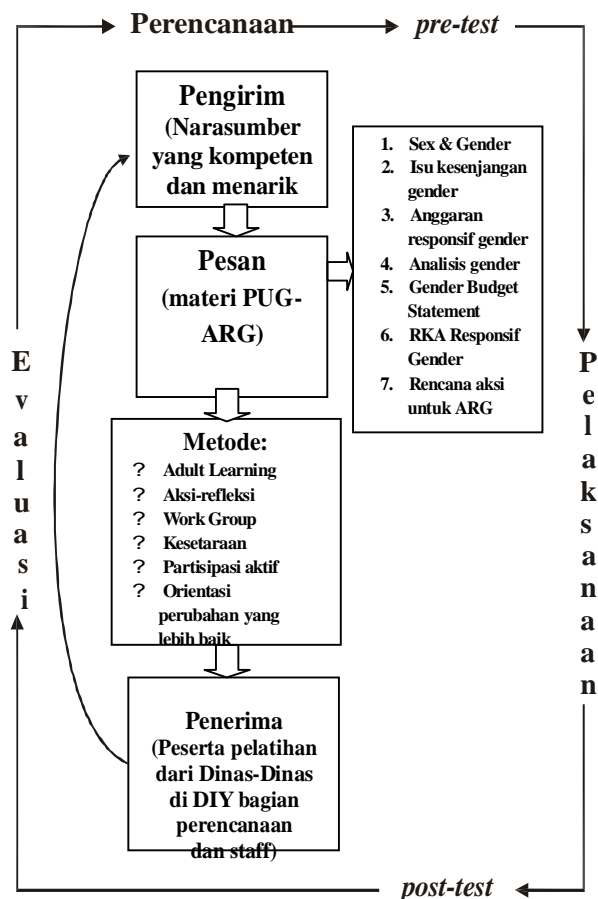
Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Pertama-tama keseluruhan data disajikan dalam display data, kemudian direduksi mana yang relevan dan mana yang tidak dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk kemudian dibuat kategorisasi. Tahap berikutnya adalah membuat interpretasi dan kesimpulan hasil penelitian berupa model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG di provinsi DIY.

Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15/2008 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 119/2009, menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah pusat dan daerah semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan (Zakiah,2009).

Pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat dan kalangan perguruan tinggi. Peran aktif dari masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya, sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkeadilan. Adanya keterbatasan sumberdaya manusia, sumberdaya pembangunan dan luasnya wilayah, serta besarnya kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut adanya sinergi yang harmonis dari semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang adil dengan melaksanakan strategi PUG.

Pelaksanaan PUG dilakukan guna menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Apakah kebijakan dan program atau kegiatan pembangunan di DIY sudah responsive



Gambar 2. Model Komunikasi dalam Sosialisasi PUG-ARG di Provinsi DIY.

gender? Hal ini dapat dicermati melalui proses pembangunan dalam: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi masyarakat secara adil.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan Model Komunikasi PUG-ARG di Provinsi DIY

Penelitian terdahulu (Lestari, Machya, dan June, 2009) menunjukkan bahwa program PUG di provinsi DIY belum berjalan baik. Berbagai pelatihan PUG sudah sering dilakukan dengan tujuan agar semua dinas dapat merespon dengan baik program PUG. Berdasarkan masukan dari hasil FGD dengan wakil-wakil Dinas di seluruh DIY dan kalangan aktivis LSM yang telah berulang kali mengikuti atau melakukan pelatihan PUG dirumuskanlah model alternatif. Model yang ditawarkan oleh penelitian ini bertujuan agar pro-

gram PUG di provinsi DIY dapat berjalan baik yaitu model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG bagi aparat dinas-dinas di seluruh kabupaten di provinsi DIY dengan materi dan metode yang benar-benar mengarah kepada pemahaman seutuhnya mengenai arti penting PUG-ARG. Sosialisasi berupa pelatihan disertai tindakan konkret mengimplementasikan PUG-ARG dalam program-program masing-masing Dinas Pemerintah. Model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.

Model ini menunjukkan empat unsur esensi komunikasi yang saling berkaitan yaitu pengirim, pesan, metode, dan penerima, apabila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Sebagai contoh pemberi materi pelatihan PUG-ARG dapat mengirimkan pesan, tetapi bila tidak ada yang menerima atau yang mendengarkan, komunikasi tidak akan terjadi.

Model komunikasi yang terperinci, dengan unsur-unsur penting dalam pelatihan PUG-ARG tersebut yaitu : (1). Sumber mempunyai gagasan, pemikiran atau kesan tentang PUG-ARG di Yogyakarta, (2). Gagasan diterjemahkan atau disandikan ke dalam kata-kata dan simbol-simbol verbal dan nonverbal, (3). Gagasan disampaikan atau dikirimkan dengan metode kepada penerima, (4). Penerima menangkap simbol-simbol secara verbal dan nonverbal, (5). Simbol diterjemahkan kembali atau diartikan kembali menjadi suatu gagasan oleh peserta pelatihan, (6). Penerima yaitu peserta pelatihan mengirimkan berbagai bentuk umpan balik kepada pengirim. Berbagai pertanyaan, tanggapan dan hasil *post test* menunjukkan adanya umpan balik.

Sumber (*source*) atau pengirim mengendalikan berbagai pesan yang dikirim, dan metode yang digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Mengubah pesan ke dalam berbagai bentuk simbol-simbol verbal atau nonverbal yang mampu memindahkan pengertian, seperti kata-kata percakapan atau tulisan, angka, gerakan, permainan, dan sebagainya.

Metode pada gambar 2 menunjukkan bahwa model komunikasi dalam sosialisasi PUG-

ARG di DIY mencakup metode : Adult Learning, Aksi-refleksi, Work Group, Kesetaraan, Partisipasi aktif, Orientasi perubahan yang lebih baik. *Adult Learning* (pembelajaran bagi orang dewasa), artinya proses komunikasi yang menganggap bahwa orang yang diberi pelatihan sudah mengerti tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan bisa disebabkan oleh faktor biologis atau faktor bawaan sejak lahir dan konstruksi sosial budaya setempat. Perbedaan kedua inilah yang didiskusikan dengan Aksi-Refleksi. Aksi yang dilakukan melalui berbagai program pemerintah, diikuti refleksi atas program-program yang sudah dijalankan, apakah sudah responsif gender, adil gender atau masih bias gender. Prinsip Kesetaraan Gender harus diperhatikan dalam model komunikasi PUG ini, melalui metode *Work Group* (kerja kelompok) pelatihan PUG dapat membuat perencanaan program kerja yang *responsive* dan adil gender pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Prinsip orientasi perubahan yang lebih baik dilakukan guna mencapai tujuan organisasi yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan partisipasi aktif setiap anggota organisasi yang terlibat (Aksara,2010).

Gambar 2 mendeskripsikan proses penyampaian pesan dalam pelatihan PUG-ARG di DIY. Proses komunikasi akan mudah diterima oleh anggota organisasi apabila pesan-pesan yang disampaikan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. Pesan dalam model komunikasi dalam sosialisasi PUG ini diatur dari materi dasar tentang sex dan Gender, Isu Kesenjangan Gender di DIY, Anggaran Responsif Gender, Analisa Gender, *Gender Budget Statement*, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Responsif Gender, dan Rencana Aksi untuk Anggaran Responsive Gender (ARG). Pesan yang lengkap dari materi dasar sampai keahlian untuk menyusun program kerja dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja *responsive gender*, dapat memperlancar komunikasi pengarusutamaan gender di Provinsi DIY (Aksara,2010).

Proses komunikasi dalam pelatihan terdiri dari tiga tahapan: (1) persiapan atau perencanaan, (2) pelaksanaan pelatihan, dan (3) evaluasi pelatihan.



## Tahap Persiapan atau Perencanaan

Pada tahap persiapan pelatihan peneliti bekerjasama dengan seksi PUG Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat provinsi DIY menyeleksi peserta yang akan diundang dalam pelatihan. Seleksi dilakukan dengan melihat berkas-berkas daftar nama peserta pelatihan PUG yang pernah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM). Dengan mempertimbangkan kriteria bahwa peserta yang akan diundang haruslah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, maka ditetapkanlah bahwa dari masing-masing kabupaten atau kota di DIY diambil satu dinas sebagai sampel. Dari masing-masing Dinas ini diundang 2 orang, terdiri dari 1 orang dari level pengambil kebijakan dan 1 orang staf. Dalam perkembangannya wakil dari Kota Yogyakarta akhirnya tidak diundang karena kota Yogyakarta telah memiliki reputasi yang bagus dalam implementasi PUG. Dengan demikian peserta yang diundang adalah wakil-wakil dari kabupaten Sleman (2 orang), kabupaten Bantul (2 orang), kabupaten Kulonprogo (2 orang), dan kabupaten Gunungkidul (2 orang) yang masing-masing terdiri dari 1 orang pengambil kebijakan dan 1 orang staf. Komposisi jenis kelamin juga diperhatikan, sehingga dari keseluruhan jumlah peserta yang diundang terdapat komposisi yang berimbang antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Pada tahap persiapan ini pula dibahas mengenai materi-materi yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta sehingga implementasi PUG di Dinas-Dinas pemerintah bisa berjalan baik. Materi-materi sengaja dipilih agar tepat sasaran dan tujuan, namun efisien dalam pelaksanaan. Hal ini terutama dengan pertimbangan bahwa personil yang menduduki kapasitas pengambil kebijakan tidak akan bisa berlama-lama meninggalkan tugas-tugasnya di kantor. Selanjutnya pada tahap persiapan ini peneliti bersamasama dengan seksi PUG BPPM memilih-milih fasilitator dan narasumber yang diharapkan dapat membuat suasana pelatihan santai dan menyenangkan, sehingga peserta tidak jenuh dan materi diserap dengan baik.

## Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Setelah tahapan persiapan selesai, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan yang dilangsungkan selama dua hari. Materi-materi yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut: Hari pertama: (1) Perbedaan seks dan gender. (2) Isu kesenjangan gender di DIY. (3) Anggaran responsif gender dan ABK. Hari kedua: (1) Analisis gender. (2) *Gender Budget Statement*. (3) RKA Responsif Gender. (4) Rencana aksi untuk ARG. Pada sesi pertama hari pertama, para peserta dibuka pemahaman dan wawasan mereka bahwa seks dan gender adalah berbeda. Fakta mengatakan bahwa Gender : (1) Perempuan sebagai pendamping dan laki-laki sebagai pemimpin (Gender). (2) Lebih banyak guru perempuan dari pada laki-laki, tetapi lebih banyak kepala sekolah laki-laki dari pada perempuan (Gender). (3) Tingkat informasi yang lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan (Gender). (4) Pada proses bencana, perempuan lebih lemah dalam menghadapi bencana karena dalam menghadapi bencana tidak hanya kekuatan fisik namun juga ketahanan (Gender). (5) Dalam pekerjaan yang sama, upah perempuan lebih rendah dari pada laki-laki (Gender). (6) Perempuan halus, laki-laki tidak (Gender). (7) Pengaruh hormonal laki-laki saat masa puber (Gender). (8) Ibu membelikan anak perempuannya baju warna *pink*, sedangkan baju untuk budi warna biru (Gender). Materi-materi tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan teori *Genderlect Styles* yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu terletak pada: (1) Kecenderungan feminis versus maskulin, (2) Perempuan berhasrat pada koneksi versus laki-laki berhasrat untuk status, (3) *Report talk versus report talk* (Griffin, 2006:470).

Materi tentang Seks bahwa: (1) Perempuan melahirkan (Seks). (2) Angka kematian perempuan yang tinggi akibat hamil, diharapkan angka kematian perempuan sama dengan laki-laki (Seks).

Materi tentang seks dan gender: (1) Perempuan menstruasi dan merasakan sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan (Seks dan Gender). (2) Saat menstruasi, payudara anak perempuan mulai membesar, maka seorang ibu

mulai membelikan *Breast Holder* (BH) (Seks dan Gender).

Pada penyampaian materi pertama juga dijelaskan bahwa seks adalah jenis kelamin biologis. Ada beberapa perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan menstruasi, laki-laki memiliki jakun, perempuan menyusui, laki-laki tidak dapat menyusui, perempuan memiliki rahim dan berkapasitas melahirkan, sementara laki-laki tidak bisa mengandung. Seks atau jenis kelamin adalah kodrati yang dimiliki sejak lahir.

Pengertian Gender berbeda dengan jenis kelamin. Seringkali orang menyebut gender adalah jenis kelamin sosial. Dalam hal ini ada persoalan konstruksi sosial, peran, akses, konstruksi agama, konstruksi budaya sangat berperan. Fokus Gender adalah laki-laki dan perempuan. Gender bisa berubah dari waktu- ke waktu sesuai tempat dan budaya. Hal ini senada dengan *Standpoint Theory* (Griffin, 2006: 482), bahwa perempuan terposisikan pada hirarkhi yang rendah dibanding posisi laki-laki. Gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi di mana kebanyakan laki-laki dan perempuan dipisahkan secara lingkungan, material, dan simbolis (sosial budaya).

Konstruksi gender dibedakan oleh sifat, peran dan fungsi, serta posisi. Peran perempuan di sektor domestik, sedangkan laki-laki berperan di sektor publik. Proses konstruksi gender yang pertama adalah identitas seks yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa; kedua adanya konstruksi gender yang dibuat oleh manusia seperti atribut gender (Maskulin, Feminim), peran gender, beban gender, hingga status gender. Apakah laki laki dan perempuan mendapatkan kesetaraan dalam mengakses informasi merupakan salah satu permasalahan dalam gender. Empat hal utama permasalahan gender adalah persoalan akses, peran, manfaat, kontrol.

Beberapa contoh ketidakadilan gender misalnya: laki-laki mendapat pendidikan yang lebih tinggi, karena laki-laki akan mencari pekerjaan untuk keluarga; perempuan tidak mendapat tunjangan keluarga dalam pekerjaan tetapi suami memiliki tunjangan untuk keluarga dalam posisi perusahaan; ada persoalan pengupahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Beberapa

contoh ketimpangan gender, laki-laki memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dari pada perempuan, persoalan subordinasi yang menempatkan perempuan sebagai pendamping dalam rumah tangga yang cenderung tidak ditanya pendapatnya, adanya pelabelan tentang perempuan yang lemah, tidak pantas melakukan pekerjaan berat, adanya persoalan marginalisasi yang mengesampingkan perempuan, adanya beban ganda bahwa seorang perempuan bergerak dalam sektor publik dan domestik, dan yang terakhir adanya kekerasan secara psikologis dan fisik yang menimpa perempuan (Data KDRT yang menimpa perempuan sebanyak 91% sedangkan yang dialami oleh laki – laki 9%).

Pada sesi kedua peserta diperkenalkan dengan profil kesenjangan gender di provinsi DIY. Profil Gender DIY jauh lebih tinggi dari pada nasional pada tahun 2006, namun masih banyak persoalan yang terjadi di Yogyakarta. Beberapa isu gender di DIY: (1) Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. (2) Akses pendidikan dasar. (3) Akses layanan kesehatan. (4) Akses perlindungan pekerja perempuan. (5) Kekerasan perempuan dan anak. (6) Minimnya perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Meskipun banyak kemajuan dalam pembagian peran pada jabatan publik, berbagai ketimpangan masih sering terjadi yaitu: (1) Kecenderungan pemisahan ruang publik antara laki laki dan perempuan. (2) Posisi kunci di jabatan publik masih banyak didominasi oleh laki-laki. (3) Perimbangan jumlah pegawai. (4) Perempuan di pos tradisional (administrasi, kesehatan, pendidikan).

Dari data yang diperoleh tahun 2005, jumlah antara perempuan dan laki-laki yang bekerja di instansi pemerintah masih sangat tidak seimbang. Masih lebih banyak jumlah laki-laki. Keterwakilan perempuan di legislatif dari tahun 1994-2004, tertinggi dipegang oleh kabupaten Sleman. Hal ini senada dengan *Muted Group Theory* atau Teori Kelompok Bungkam (West and Turner, 2008: 200), Griffin, 2006: 494), bahwa: (1) Perempuan menanggapi dunia secara berbeda dari laki-laki karena pengalaman dan aktivitasnya berbeda yang berakar pada pembagian pekerja-

an. (2) Berdasarkan dominasi politiknya, sistem persepsi laki-laki menjadi lebih dominan, menghambat ekspresi bebas bagi pemikiran alternatif perempuan. (3) Agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah perspektif ke dalam sistem ekspresi yang dapat diterima laki-laki.

### Tahap Evaluasi Pelatihan

Pada tahap ini dilakukan penilaian atas proses perencanaan dan pelaksanaan, baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta pelatihan. Penyelenggara yaitu tim peneliti bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat di DIY melakukan evaluasi bersama. Hasilnya bahwa proses perencanaan (materi atau pesan, metode, media atau sarana dan prasarana, fasilitator, pemilihan peserta, tempat, waktu, dan sebagainya) sudah baik dan tidak ada masalah. Hal ini dikroscek dengan hasil evaluasi dari peserta melalui angket (*post test*), bahwa hampir semua merasa puas mengikuti pelatihan PUG dengan model tersebut. Hasil *post test* jugadiketahui bahwa peserta sudah mengerti semua materi yang diberikan, sudah mampu membuat program kerja yang responsive gender, dan akan menindaklanjutinya pada SKPD masing-masing. Jadi hasil pelatihan dengan model komunikasi pelatihan PUG seperti ini dapat langsung diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing.

### Simpulan

Program sosialisasi PUG yang pernah dilakukan di provinsi DIY belum sepenuhnya membawa dampak yang menggembirakan bagi kondisi hidup perempuan di provinsi DIY, terutama di tingkat kabupaten, posisi perempuan masih relatif marginal. Paling tidak hal ini terlihat dari kondisi hidup perempuan di kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Sementara itu di kota Yogyakarta kondisi perempuan relatif sudah bagus, karena program PUG terimplementasikan dengan baik di kota Yogyakarta.

Berdasarkan evaluasi berbagai pelatihan PUG yang sudah pernah dilakukan di provinsi DIY

terlihat bahwa berbagai sosialisasi yang sudah dilakukan tersebut terdapat beberapa kendala kurangnya komunikasi misalnya: aspek pemberi pesan, pesan atau materi, metode, maupun segmen penerima pesan atau peserta pelatihan belum tepat sasaran. Kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian mengapa pelatihan PUG tidak berhasil guna adalah karena peserta yang hadir selalu berganti-ganti dan terlebih lagi peserta bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Hal ini berakibat usai pelatihan materi-materi yang telah diperoleh peserta selama pelatihan tidak bisa ditindaklanjuti.

Penelitian ini mencoba menawarkan model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG dengan harapan dapat lebih berhasil guna dalam mendorong kesetaraan gender. Aspek utama yang ditekankan dari model komunikasi PUG-ARG ini adalah peserta haruslah orang yang memiliki kewenangan atau terlibat dalam pembuatan keputusan, terutama berkait dengan anggaran. Materi juga sengaja diringkas dan dipilih materi-materi yang secara langsung bisa mengubah nasib perempuan.

Dari hasil penelitian ini setidaknya terlihat adanya indikator keberhasilan. Hal ini terlihat dari antusiasisme peserta pelatihan yang sangat bersemangat mengikuti seluruh materi. Indikator lain adalah bahwa seluruh peserta menyerap dengan baik seluruh materi, terbukti dari jawaban-jawaban yang diberikan dalam *post test*. Indikator penting lain adalah adanya komitmen dari seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil yang sudah didapatkan dalam pelatihan. Peserta berkomitmen untuk mulai mencermati anggaran di Dinas masing-masing dan merevisi anggaran yang lebih responsif gender.

### Saran

Peneliti menyarankan kepada semua pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan, terutama Bappeda dan BPPM agar secara terus-menerus melakukan pelatihan-pelatihan PUG dalam format yang lebih ringkas, tapi berhasil guna. Setiap tahap pelatihan berlangsung dua hari dan kemudian dilanjutkan di lain waktu dengan durasi waktu dua hari juga,

dan demikian seterusnya hingga peserta sudah mencapai tahap *advance*. Dalam hal ini peserta haruslah orang yang sama, yaitu orang yang memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesetaraan gender dan yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dan terlibat dalam perumusan anggaran.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dirjen Dikti Diknas RI yang telah membiayai penelitian berjudul “Pengarutamaan Gender (PUG) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” melalui skema Penelitian Hibah Kompetitif Penelitian sesuai Prioritas Nasional Batch I Tahun 2009-2010 yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dekan FISIP, ketua dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN “Veteran” Yogyakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, serta peserta FGD dan pelatihan PUG-ARG dari dinas-dinas di Provinsi DIY yang telah membantu proses penelitian tentang PUG di DIY. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu penelitian dan publikasi di Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi UPN “Veteran” Yogyakarta.

### Daftar Pustaka

- Aksara, LSM, 2010, *Alat-Alat Analisa Anggaran*. Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) kerjasama LPPM UPN-BPPM DIY, 4-5 Agustus 2010.
- Aksara, LSM, 2010, *Sex dan Gender : Jenis Kelamin Sosial dan Biologis*, Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) kerjasama LPPM UPN-BPPM DIY, 4-5 Agustus 2010.
- Aksara, LSM, 2010, *Indikator Anggaran Responsif Gender*. Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) kerjasama LPPM UPN-BPPM DIY, 4-5 Agustus 2010.
- Basalama, Nonny, 2010, *An Analysis of Communication Difficulties Across Culture and Gender*, *Jurnal INOVASI*, Volume 7, Nomor 2, Juni 2010 ISSN 1693-9034.
- BPPM, 2009, *Laporan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DIY*, BPPM, Yogyakarta.
- Dewi, Machya Astuti, 2009, *Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan*, *Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi B*, Volume 7 Nomor 3.
- Griffin, EM., 2006, *A First Look At Communication Theory*, Mc Graw Hill, New York.
- IDEA, 2007, *Diskusi 16 Hari Tanpa kekerasan*, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Yogyakarta, 10 Desember 2007.
- Lestari, Machya, dan June, 2009, *Kendala Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka Otonomi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Laporan penelitian Hibah Kompetitif sesuai Prioritas nasional Batch I.
- Partini, 2004, *Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah dalam Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik*, Volume 7, Nomor 3.
- Silawati, Hartian, 2006, *Pengarutamaan Gender: Mulai dari Mana?* dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 50.
- Soeparman, Surjadi, 2006, *Mengapa Gender-mainstreaming Menjadi Aksi Nasional?* dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 50.
- Subiyantoro, Eko Bambang, 2006, *Mengintip Perspektif Gender Dalam Dokumen APBD dalam Jurnal Perempuan* edisi 46.
- Sulistyo, Susilo Budhi & Dati Fatimah, 2010, *Potret Yogyakarta dan Isu Kesenjangan Gender*, LSM AKSARA, Yogyakarta.
- Zakiah, Wasingatu, 2009, *Sekilas Tentang Gender Budget: Bahan Pemantik Workshop Analisis PUG Bidang Kesejahteraan Sosial*, IDEA, Yogyakarta,

- West, Richard & Lynn H. Turner, 2007, *Introducing Communication Theory*, McGraw-Hill Companies. New York.
- West, Richard & Lynn H. Turner, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, buku 2, Ter-jemahan, Editor Nina Setyaningsih, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

